

LAPORAN KEUANGAN 2018



AUDITED

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Singkatan	vi
Pernyataan Telah di Reviu	vii
Ringkasan.....	viii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ix
I. Ringkasan.....	1
II. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional.....	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Kebijakan Teknis Ombudsman RI.....	8
A.3. Pendapatan Ombudsman RI.....	9
A.4. Belanja Ombudsman RI.....	10
A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	12
A.7. Basis Akuntansi	25
A.8. Dasar Pengukuran	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	27
B.2. Belanja Negara.....	28
B.2.1. Belanja Pegawai	29
B.2.2. Belanja Barang	30
B.2.3. Belanja Modal	31
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar	33
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	33
C.1.2. Piutang Bukan Pajak.....	35
C.1.3. Persediaan.....	36
C.2. Aset Tetap	36
C.2.1. Tanah.....	37
C.2.2. Peralatan dan Mesin	38

C.2.3. Aset Tetap Lainnya.....	40
C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	41
C.3. Aset Lainnya	41
C.3.1. Aset Tak Berwujud.....	42
C.3.2. Aset Lain-Lain.....	43
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	44
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	44
C.5. Ekuitas.....	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	47
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional.....	47
D.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	47
D.1.2. Beban Operasional	47
D.1.2.1. Beban Pegawai	48
D.1.2.2. Beban Persediaan	48
D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa.....	49
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan.....	49
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas	50
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	51
D.1.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	51
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional.....	52
D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar.....	52
D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	54
E.1. Ekuitas Awal	54
E.2. Surplus (Defisit) LO.....	54
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas.....	54
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	54
E.3.2. Koreksi Lain-Lain.....	55
E.4. Transaksi Antar Entitas	55
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain	55
E.4.2. Diterima dari Entitas Lain.....	56
E.5. Ekuitas Akhir.....	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Ringkasan LRA 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	1
TABEL 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	2
TABEL 3 Perbandingan Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	10
TABEL 4 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	10
TABEL 5 Kebijakan Akuntansi atas Amortisasi Aset Tak Berwujud	21
TABEL 6 Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	23
TABEL 7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	24
TABEL 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018	27
TABEL 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	27
TABEL 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2018	28
TABEL 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	29
TABEL 12 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	30
TABEL 13 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	31
TABEL 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017....	32
TABEL 15 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	33
TABEL 16 Rincian Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	34
TABEL 17 Rincian Mutasi Belanja Barang Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) Tahun 2018 dan 2017....	34
TABEL 18 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	35
TABEL 19 Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak Tahun 2018 dan Tahun 2017	35
TABEL 20 Rincian Persediaan	36
TABEL 21 Rincian Aset Tetap 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	37
TABEL 22 Perbedaan Saldo Aset Tetap menurut LK dan LBMN	37
TABEL 23 Nilai Tanah 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	38
TABEL 24 Nilai Tanah 30 September 2018	38
TABEL 25 Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan Tahun 2017	39
TABEL 26 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017..	39
TABEL 27 Nilai Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	40
TABEL 28 Mutasi Aset Tetap Lainnya	40
TABEL 29 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	41
TABEL 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
TABEL 31 Rincian Aset Lainnya	42
TABEL 32 Nilai Aset Tak Berwujud 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	42

TABEL 33 Rincian Aset Tak Berwujud	42
TABEL 34 Nilai Aset Lain-Lain 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	43
TABEL 35 Rincian Aset Lain-Lain	43
TABEL 36 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	44
TABEL 37 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	44
TABEL 38 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	45
TABEL 39 Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	45
TABEL 40 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	46
TABEL 41 Rincian Beban Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	47
TABEL 42 Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	48
TABEL 43 Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	48
TABEL 44 Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	49
TABEL 45 Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	50
TABEL 46 Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	50
TABEL 47 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	51
TABEL 48 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	52
TABEL 49 Rincian Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	52
TABEL 50 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	53
TABEL 51 Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	54
TABEL 52 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	54
TABEL 53 Rincian Koreksi Lain-Lain 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	55
TABEL 54 Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	55

DAFTAR GRAFIK

Halaman

GRAFIK 1 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	11
GRAFIK 2 Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2018.....	28

KATA PENGANTAR

Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu entitas Pengguna Anggaran/Barang sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Pemerintah yang sehat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2019

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 19730916 199311 1 001

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
RI	: Republik Indonesia
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2018 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Semua informasi tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Ombudsman Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya kelemahan pengelolaan persediaan, baik dari sistem dan pencatatannya. Terhadap pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak manajemen.

Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga diatas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan terkait lainnya.





OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2019

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 19730916 199311 1 001

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2018 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp131.122.684,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp147.588.308.701,00 atau 97,20% dari anggaran dalam DIPA sebesar Rp151.839.556.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut:

TABEL 1
Ringkasan LRA 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	131.122.684	0	666.735.315
Belanja Rupiah Murni	151.839.556.000	147.588.308.701	155.128.664.000	138.716.298.862

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah Rp27.392.039.799,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp3.987.581.300,00 dan Aset Tetap sebesar Rp22.997.047.403,00 serta Aset lainnya sebesar Rp407.411.096,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah Rp 375.211.249,00. Sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah Rp27.016.828.550,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut:

TABEL 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
	31-12-2018	31-12-2017	
Aset			
Aset Lancar	3.987.581.300	4.118.251.762	(130.670.462)
Aset Tetap	22.997.047.403	23.596.384.504	(599.337.101)
Aset Lainnya	407.411.096	467.507.982	(60.096.886)
Jumlah Aset	27.392.039.799	28.182.144.248	(790.104.449)
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	375.211.249	329.574.269	45.636.980
Ekuitas			
Ekuitas	27.016.828.550	27.852.569.979	(835.741.429)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	27.392.039.799	28.182.144.248	(790.104.449)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.952.852,00 sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp149.119.300.894,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(Rp149.117.348.042,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp384.855.714,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(148.732.492.328,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Ekuitas pada Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| • Ekuitas Awal 01/01/2018 | Rp 27.852.569.979,00 |
| • Defisit Laporan Operasional | (Rp 148.732.492.328,00) |
| • Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi | Rp 439.564.882,00 |
| • Transaksi Antar Entitas | Rp 147.457.186.017,00 |
| • Ekuitas Akhir 31/12/2018 | Rp 27.016.828.550,00 |

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sedangkan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	CATA TAN	31 DESEMBER 2018		% TASE	(dalam Rupiah)
		ANGGARAN	REALISASI		31 DES 2017 REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
➤ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	131.122.684	0,00	666.735.315
JUMLAH PENDAPATAN		-	131.122.684	0,00	666.735.315
BELANJA	B.2				
➤ Belanja Pegawai		59.982.380.000	59.982.337.390	100,00	48.183.387.998
➤ Belanja Barang		88.444.311.000	84.234.512.644	95,24	84.645.740.449
➤ Belanja Modal		3.412.865.000	3.371.458.667	98,79	5.887.170.415
JUMLAH BELANJA		151.839.556.000	147.588.308.701	97,20	138.716.298.862
➤ Belanja Pegawai	B.2.1	59.982.380.000	59.982.337.390	100,00	48.183.387.998
➤ Belanja Barang	B.2.2	88.444.311.000	84.234.512.644	95,24	84.645.740.449
➤ Belanja Modal	B.2.3	3.412.865.000	3.371.458.667	98,79	5.887.170.415

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. NERACA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2018	31 DES 2017
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
➤ Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
➤ Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	0
➤ Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.3	3.113.505.376	3.120.991.906
➤ Piutang Bukan Pajak	C.1.4	37.014.633	119.447.063
➤ Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(185.073)	(597.235)
➤ <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		36.829.560	118.849.828
➤ Persediaan	C.1.5	837.246.364	878.410.028
JUMLAH ASET LANCAR		3.987.581.300	4.118.251.762
ASET TETAP	C.2		
➤ Tanah	C.2.1	7.315.400.000	7.315.400.000
➤ Peralatan dan Mesin	C.2.2	41.357.097.591	40.151.199.049
➤ Aset Tetap Lainnya	C.2.3	4.225.119.385	3.069.208.880
➤ Akumulasi Penyusutan	C.2.4	(29.900.569.573)	(26.939.423.425)
JUMLAH ASET TETAP		22.997.047.403	23.596.384.504
ASET LAINNYA	C.3		
➤ Aset Tak Berwujud	C.3.1	764.229.234	669.729.234
➤ Aset Lain-lain	C.3.2	815.822.395	1.256.377.439
➤ Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.172.640.533)	(1.458.598.691)
JUMLAH ASET LAINNYA		407.411.096	467.507.982
JUMLAH ASET		27.392.039.799	28.182.144.248
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
➤ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	375.211.249	329.574.269
➤ Uang Muka dari KPPN	C.4.2	0	0
➤ Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.2	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		375.211.249	329.574.269
JUMLAH KEWAJIBAN		375.211.249	329.574.269
EKUITAS			
➤ Ekuitas	C.5	27.016.828.550	27.852.569.979
JUMLAH EKUITAS		27.016.828.550	27.852.569.979
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.392.039.799	28.182.144.248

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN OPERASIONAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	CATATAN	2018	(dalam Rupiah) 2017
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL			
➤ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	1.952.852	23.574.250
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1	1.952.852	23.574.250
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
➤ Beban Pegawai	D.1.2.1	60.219.273.830	48.161.588.930
➤ Beban Persediaan	D.1.2.2	2.453.570.050	1.922.700.830
➤ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	35.795.536.505	36.627.603.908
➤ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	5.557.003.631	5.158.534.240
➤ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	39.741.146.847	40.026.787.582
➤ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	5.353.182.193	5.213.355.679
➤ Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.1.2.7	(412.162)	108.995
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	D.1.2	149.119.300.894	137.110.680.164
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)	D.1	(149.117.348.042)	(137.087.105.914)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1	(6.341.724)	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	391.197.438	1.203.565.605
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)	D.2	384.855.714	1.203.565.605
SURPLUS/DEFISIT LO (D.1+D.2)		(148.732.492.328)	(135.883.540.309)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	27.852.569.979	25.692.199.866
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(148.732.492.328)	(135.883.540.309)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI NILAI EKUITAS	E.3		
➤ Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
➤ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	300.756.642	(5.653.125)
➤ Koreksi Lain-lain	E.3.3	138.808.240	0
Jumlah Koreksi	E.3	439.564.882	(5.653.125)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
➤ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	147.588.308.701	138.716.298.862
➤ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(131.122.684)	(666.735.315)
➤ Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Jumlah Transaksi Antar Entitas	E.4	147.457.186.017	138.049.563.547
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(E2+E3+E4)	(835.741.429)	2.160.370.113
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.5	27.016.828.550	27.852.569.979

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 – 2021, visi Ombudsman Republik Indonesia adalah “Ombudsman Republik Indonesia yang Berwibawa, Efektif dan Adil”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Memperkuat Kelembagaan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan.
5. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Terwujudnya kelembagaan Ombudsman RI yang kuat.
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Ombudsman RI.
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap Hak-Hak Dasar melalui Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Penyelenggara Layanan Publik
5. Menguatnya Peran Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Maladministrasi dan Korupsi.

Pendapatan

A.3. PENDAPATAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Di dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 Ombudsman Republik Indonesia tidak mencatumkan estimasi pendapatan.

Realisasi PNBP Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp131.122.684,00 yang terdiri atas Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu.

Dibandingkan dengan 31 Desember 2017 dengan realisasi terdiri atas PNBP berupa Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL sebesar Rp666.735.315,00.

Perbandingan realisasi pendapatan Negara dan Hibah Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember Tahun Anggaran 2018 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2017 disajikan sebagai berikut :

TABEL 3
Perbandingan Pendapatan
31 Desember 2018 Dan 31 Desember 2017

No.	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2018	2017	
1.	Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu	131.122.684	666.735.315	(535.612.631)
2.	Pendapatan lain-lain	0	0	0
JUMLAH		131.122.684	666.735.315	(535.612.631)

Belanja

A.4. BELANJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp147.588.308.701,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp151.839.556.000,00 yang keseluruhannya bersumber dari belanja rupiah murni. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

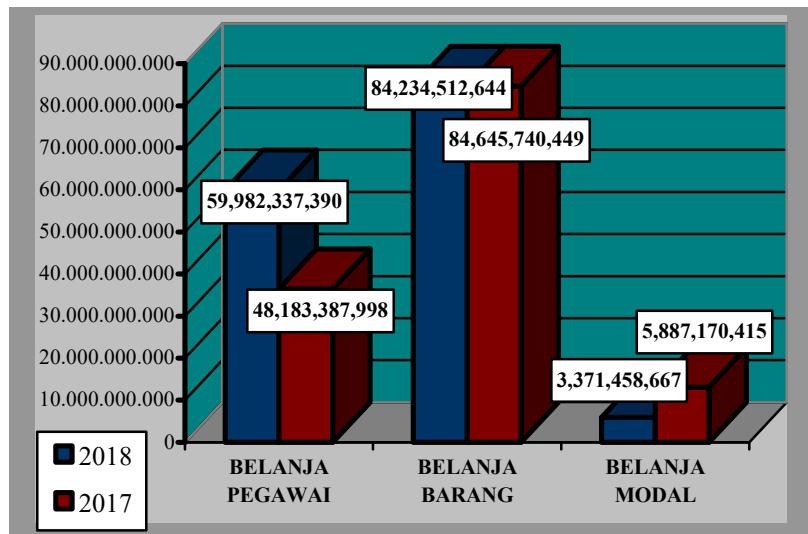
Rincian realisasi belanja Anggaran 31 Desember Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2017 disajikan sebagai berikut :

TABEL 4
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 Dan 31 Desember 2017

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2018	2017	
51	Belanja Pegawai	59.982.337.390	48.183.387.998	11.798.949.392
52	Belanja Barang	84.234.512.644	84.645.740.449	(411.227.805)
53	Belanja Modal	3.371.458.667	5.887.170.412	(2.515.711.745)
JUMLAH		147.588.308.701	138.716.298.862	8.872.009.839

Komposisi Realisasi Belanja Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1.
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 Dan 2017



Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan 31 Desember 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Realisasi APBN terdiri atas Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia dan disusun berdasarkan SAI.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

6. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas

aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember Tahun 2018 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia adalah:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direaliasasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Ombudsman Republik Indonesia berasal dari Kegiatan Non-operasional yaitu dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang

Lalu.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi :

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/ BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam

bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51% disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Hukum Milik Negara (BUMN/ BHMN). Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51% (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode equitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan

pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan Kurs Tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan, yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian

Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

TABEL 5
Kebijakan Akuntansi atas Amortisasi Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang	10
Hak Ekonomis Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka , Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih*

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo

dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

TABEL 6
Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6

TABEL 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Informasi
Pendapatan dan
Belanja Akrual*

(10) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat, satuan kerja pada kementerian/ lembaga selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual berdasarkan data akrual pada tanggal pelaporan. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) Tahunan.

Informasi pendapatan secara akrual diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas dan disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual, sedangkan belanja secara akrual diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrual.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri atas :

- a. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambahan pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang pada neraca.
- b. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.

Transaksi belanja secara akrual terdiri atas :

- a. Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.
- b. Belanja dibayar dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang neraca.

Basis Akuntansi

A.7. BASIS AKUNTANSI

Ombudsman RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realiasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.8. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Ombudsman RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp 131.122.684*

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah Rp131.122.684,00 yang merupakan pendapatan penerimaan negara bukan pajak.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut ini.

TABEL 8.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2018

URAIAN	31 DESEMBER 2018		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	27.110.382	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	272.602	-
Pendapatan Lain-lain	-	103.739.700	-
Jumlah Pendapatan	-	131.122.684	-

Berdasarkan Tabel 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 80,33 persen dari realisasi pendapatan PNBP 31 Desember Tahun Anggaran 2017.

TABEL 9.
Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2017	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	27.110.382	-	100
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	272.602	-	100
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	23.574.250	(100)
Pendapatan Lain-lain	103.739.700	643.161.065	(83,87)
Jumlah Pendapatan	131.122.684	666.735.315	(80,33)

Pendapatan pada Ombudsman RI merupakan pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan jasa giro, penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu serta temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2018. Daftar rincian PNBP Tahun 2018 (lihat lampiran pendukung).

*Realisasi Belanja
Negara
Rp 147.588.308.701*

B.2. Belanja Negara

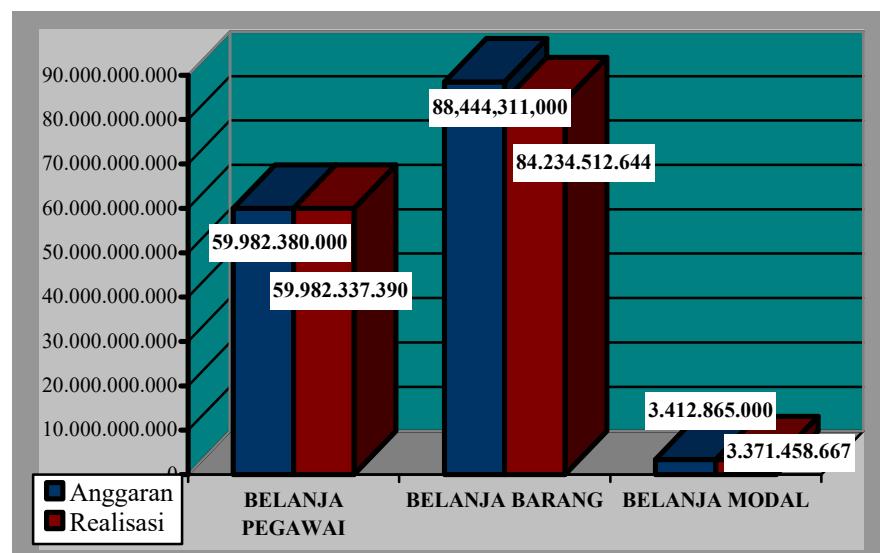
Realisasi belanja Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2018 adalah Rp147.588.308.701,00 atau 97.20% dari anggaran senilai Rp151.839.556.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 10.
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	59.982.380.000	59.982.337.390	100
Belanja Barang	88.444.311.000	84.234.512.644	95,24
Belanja Modal	3.412.865.000	3.371.458.667	98,79
Total Belanja	151.839.556.000	147.588.308.701	97,20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK 2.
Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2018



Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,40 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2017.

Kenaikan Realisasi Belanja disebabkan oleh:

1. Penambahan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka mendukung rencana kerja strategis.
2. Penambahan kegiatan substansi sesuai dengan RPJMN 2015-2019.
3. Penambahan pegawai dan kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil Ombudsman Republik Indonesia.

TABEL 11.
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2018	REALISASI 31 Desember 2017	% Naik(Turun)
Belanja Pegawai	59.982.337.390	48.183.387.998	24,49
Belanja Barang	84.234.512.644	84.645.740.449	(0,49)
Belanja Modal	3.371.458.667	5.887.170.415	(42,73)
Jumlah Belanja	147.588.308.701	138.716.298.862	6,40

Belanja Pegawai

Rp59.982.337.390

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2018 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Honorarium; dan Belanja Tunjangan Khusus.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2018 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2017 masing-masing sebesar Rp59.982.337.390,00 dan Rp48.183.387.998,00 dan terdapat pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran sebesar Rp50,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut .

TABEL 12.
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2018	REALISASI 31 Desember 2017	% (Naik/ Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.567.787.370	7.100.379.537	6,58
Belanja Honorarium	19.133.395.303	14.764.325.500	29,59
Belanja Tunjangan Khusus	33.281.154.407	26.328.908.446	26,41
Jumlah Belanja Kotor	59.982.337.440	48.193.613.483	24,46
Pengembalian Belanja Pegawai	(50)	(10.225.465)	(100)
Jumlah Belanja Bersih	59.982.337.390	48.183.387.998	24,49

Berdasarkan Tabel tersebut realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 24,49% dari realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2017.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
2. Adanya pelantikan pejabat struktural di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
3. Kenaikan Penghasilan Ketua dan Anggota Ombudsman RI.
4. Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Pegawai Negeri Sipil Ombudsman RI menjadi 70%.

Belanja Barang
Rp84.234.512.644

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2017 masing-masing sebesar Rp84.234.512.644,00 dan Rp84.645.740.449,00.

Berdasarkan Tabel 12 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 mengalami penurunan 0,49% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia.

TABEL 13.
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2018	REALISASI 31 Desember 2017	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	10.563.997.678	8.771.194.408	20,44
Belanja barang persediaan	2.131.223.549	1.697.587.182	25,54
Belanja Barang Non Operasional	7.705.776.373	11.959.116.215	(35,56)
Belanja Jasa	17.364.706.060	17.154.226.324	1,22
Belanja Pemeliharaan	6.807.814.014	5.060.368.608	34,53
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	40.686.077.932	42.591.628.233	4,47
Belanja Perjalanan Luar Negeri	467.956.075	218.467.834	114,2
Jumlah Belanja Kotor	85.727.551.681	87.452.588.804	1,97
Pengembalian Belanja	(1.493.039.037)	(2.806.848.355)	(46,8)
Jumlah Belanja Bersih	84.234.512.644	84.645.740.449	(0,49)

Terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp1.493.039.037,00 selama tahun 2018 (lihat lampiran pendukung).

Belanja Modal
Rp3.371.458.667

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.371.458.667,00 dan Rp5.887.170.415,00. Realisasi terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.146.170.667,00 dan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp225.288.000,00.

TABEL 14.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2018	REALISASI 31 Desember 2017	%(NAIK /TURUN)
Kendaraan Bermotor	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.146.170.667	4.350.337.428	(27,68)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	996.664.467	0
Belanja Modal Lainnya	225.288.000	540.168.520	(58,29)
Jumlah Belanja Kotor	3.371.458.667	5.887.170.415	(42,73)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	3.371.458.667	5.887.170.415	(42,73)

Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebesar 42,73 persen bersamaan dengan penurunan Anggaran Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2018.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp3.987.581.300

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.987.581.300,00 dan Rp4.118.251.762,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 15.
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	ASET LANCAR	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Belanja Dibayar di Muka	3.113.505.376	3.120.991.906
2	Piutang Bukan Pajak	37.014.633	119.447.063
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(185.073)	(597.235)
4	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>36.829.560</i>	<i>118.849.828</i>
5	Persediaan	837.246.364	878.410.028
	Jumlah	3.987.581.300	4.118.251.762

*Belanja Barang
Dibayar Dimuka
Rp3.113.505.376*

C.1.1. Belanja Barang Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah Rp3.113.505.376,00 dan Rp3.120.991.906,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/jasa belum diterima.

Rincian Belanja Barang Dibayar Dimuka disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 16.

Rincian Belanja Barang Dibayar di Muka (*prepaid*) 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	JENIS	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Pembayaran Sewa Kendaraan	1.367.051.471	1.358.496.046
2	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.592.603.770	1.762.495.860
3	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	81.713.177	-
4	Belanja Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak RFID	72.136.958	-
Jumlah		3.113.505.376	3.120.991.906

Mutasi tambah dan mutasi kurang dari Belanja Barang Dibayar di Muka (*prepaid*) disajikan pada tabel berikut.

TABEL 17.

Rincian Mutasi Belanja Barang Dibayar di Muka (*prepaid*) Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017
Saldo Awal per 1 Januari	3.120.991.906	2.883.605.758
Mutasi Kurang:		
Pembayaran Sewa Kendaraan	1.358.496.046	1.617.424.244
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.762.495.860	1.266.181.514
Mutasi Tambah:		
Pembayaran Sewa Kendaraan	1.367.051.471	1.358.496.046
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.592.603.770	1.762.495.860
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	81.713.177	-
Belanja Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak RFID	72.136.958	-
Saldo Akhir per 31 Desember	3.113.505.376	3.120.991.906

*Piutang Bukan
Pajak
Rp36.829.560*

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp36.829.560,00 disebabkan telah dibayarkannya oleh masing-masing pegawai Ombudsman Republik Indonesia. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 18.
Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	JENIS	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	-	82.420.000
2	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	37.014.633	37.027.063
Piutang Bukan Pajak		37.014.633	119.447.063
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		(185.073)	(597.235)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		36.829.560	118.849.828

Mutasi tambah dan mutasi kurang dari Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut.

TABEL 19.
Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak Tahun 2018 dan Tahun 2017

URAIAN	2018	2017
Saldo Awal	119.447.063	97.647.995
Mutasi Masuk :		
Pelunasan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	82.420.000	76.583.400
Pelunasan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	37.027.063	21.064.595
Mutasi Keluar :		
Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	-	82.240.000
Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	37.014.633	37.027.063
Saldo Akhir	37.014.633	119.447.063

Persediaan
Rp837.246.364

C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah Rp837.246.364,00 dan Rp878.410.028,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 20.
Rincian Persediaan

URAIAN	KODE AKUN	2018	2017
Saldo Awal per 1 Januari		878.410.028	544.904.636
Mutasi Tambah:			
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	521811	2.131.223.549	1.695.861.682
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	491511	485.192.520	812.088.093
Mutasi Kurang:			
Beban Persediaan Konsumsi	593111	2.453.510.050	1.922.700.830
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	593113	2.442.860	60.000
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	593311	196.054.532	251.683.553
Beban Persediaan Suku Cadang	593114	210.000	-
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	593121	60.000	-
Kesalahan Pembebanan Akun 521811		5.302.291	-
Saldo Akhir per 31 Desember		837.246.364	878.410.028

Aset Tetap
Rp22.997.047.403

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing tersaji sebesar Rp22.997.047.403,00 dan Rp23.596.384.504,00. Aset Tetap yang disajikan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 21.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	JENIS	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Tanah	7.315.400.000	7.315.400.000
2	Peralatan dan Mesin	41.357.097.591	40.151.199.049
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	4.225.119.385	3.069.208.880
Jumlah		52.897.616.976	50.535.807.929
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(29.900.569.573)	(26.939.423.425)
Nilai Buku Aset Tetap		22.997.047.403	23.596.384.504

Berdasarkan PMK No.57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 57/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-44/KN/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan penilaian kembali BMN selesai ditindaklanjuti. Kondisi berdampak terhadap perbedaan aset tetap berdasarkan LBMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 22.
Perbedaan Saldo Aset Tetap menurut LK dan LBMN

NO	JENIS	SALDO MENURUT LK	SALDO MENURUT LBMN	SELISIH
1	Tanah	7.315.400.000	25.847.516.000	18.532.116.000
2	Peralatan dan Mesin	41.357.097.591	41.357.097.591	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	4.225.119.385	4.225.119.385	-
Jumlah		52.897.616.976	71.429.732.976	18.532.116.000

Tanah Rp7.315.400.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan transfer dari BPKP Perwakilan DI Yogyakarta seluas 895 m² dan Sumatera Barat 2.188 m² untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan

Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST-350/SU/05/2014 Tanggal 24 Februari 2014. Nilai tanah keseluruhan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia adalah sebesar Rp7.315.400.000,00. Tanah tersebut sudah memiliki gambar gedung (blue print) tetapi belum di bangun kerena keterbatasan kesediaan anggaran Ombudsman Republik Indonesia. Pada bulan Januari 2018 dilakukan penilaian kembali atas nilai tanah oleh Tim Pelaksana Penilai Kembali Barang Milik Negara menjadi sebesar Rp25.847.516.000,00. Nilai tanah per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 23.
Nilai Tanah 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	PERWAKILAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	D. I. Yogyakarta	4.689.800.000	4.689.800.000
2	Sumatera Barat	2.625.600.000	2.625.600.000
Jumlah		7.315.400.000	7.315.400.000

Terdapat perbedaan data antara pencatatan dalam Laporan Keuangan dengan pencatatan di Laporan Barang Milik Negara sebesar Rp18.532.116.000,00 yang merupakan hasil dari *take out* revaluasi nilai aset berupa Tanah yang sebelumnya telah dilakukan pencatatan nilai kapitalisasi dalam Laporan Barang Milik Negara pada semester 1 tahun anggaran 2018. Perbedaan atas *take out* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 24.
Nilai Tanah 30 September 2018

NO	PERWAKILAN	NILAI PEROLEHAN	PENILAIAN KEMBALI	NILAI PEROLEHAN
1	D. I. Yogyakarta	4.689.800.000	10.193.101.000	14.882.901.000
2	Sumatera Barat	2.625.600.000	8.339.015.000	10.964.615.000
Jumlah		7.315.400.000	18.532.116.000	25.847.516.000

Peralatan dan Mesin
Rp41.357.097.591

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp41.357.097.591,00 dan

Rp40.151.199.049,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.564.103.963,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp11.792.993.628,00. Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 25.
Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan Tahun 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Alat Bantu	122.727.090	122.727.090
2	Alat Angkutan Darat	10.109.321.243	7.652.471.243
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	82.177.000	58.107.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.168.471.367	14.247.155.656
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.212.544.759	2.489.175.379
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	178.372.050	178.372.050
7	Alat Laboratorium	26.488.750	26.488.750
8	Alat Persenjataan	83.944.500	83.944.500
9	Komputer	14.254.050.832	15.173.757.381
10	Alat Keselamatan Kerja	90.900.000	90.900.000
11	Peralatan Proses/Produksi	12.200.000	12.200.000
12	Peralatan Olah Raga	15.900.000	15.900.000
Jumlah		41.357.097.591	40.151.199.049

Terdapat kenaikan nilai peralatan dan mesin selama tahun 2018 sebesar Rp1.205.898.542,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 26.
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
Nilai Perolehan Awal	40.151.199.049	35.608.495.801
Mutasi tambah:		
Pembelian	3.113.470.665	4.542.703.248
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	227.416.025	-
Saldo Awal	169.218.300	-
Mutasi kurang:		-
Penghapusan Aset	2.251.462.298	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	52.744.150	-

Saldo per 31 Desember Akhir	41.357.097.591	40.151.199.049
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(29.564.103.963)	(26.838.741.033)
Nilai Buku per 31 Desember	11.792.993.628	13.312.458.016

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa penambahan dari pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp1.205.898.542,00.

*Aset Tetap Lainnya
Rp4.225.119.385*

C.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp4.225.119.385,00 dan Rp3.069.208.880,00.

Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 27.
Nilai Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	4.174.183.910	3.020.471.755
2	Bahan Perpustakaan Tercetak	35.135.475	32.937.125
3	Alat Bercorak Kebudayaan	15.800.000	15.800.000
Jumlah		4.225.119.385	3.069.208.880

Terdapat kenaikan nilai aset tetap lainnya selama tahun 2018 sebesar Rp1.155.910.505,00. Mutasi nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 28.
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	2018	2017
Saldo per 01 Januari	3.069.208.880	2.052.544.413
Mutasi tambah:		
Pembelian	-	996.664.467
Koreksi Nilai	1.155.910.505	20.000.000
Mutasi kurang:		
Koreksi nilai	-	-
Saldo per 31 Desember	4.225.119.385	3.069.208.880
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(336.465.610)	(100.682.392)

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(29.900.569.573)*

Nilai Buku per 31 Desember	3.888.653.775	2.968.526.488
----------------------------	---------------	---------------

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah Rp(29.900.569.573,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

TABEL 29.
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.564.103.963	26.838.741.033
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	336.465.610	100.682.392
Jumlah		29.900.569.573	26.939.423.425

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 30.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	7.315.400.000	0	7.315.400.000
2	Peralatan dan Mesin	41.357.097.591	29.564.103.963	11.792.993.628
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	4.225.119.385	336.465.610	2.897.949.704
Jumlah		51.809.931.971	29.900.569.573	22.997.047.403

*Aset Lainnya
Rp407.411.096*

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp407.411.096,00 dan Rp467.507.982,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

TABEL 31.
Rincian Aset Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Aset Tak Berwujud	764.229.234	669.729.234
2	Aset Lain-lain	815.822.395	1.256.377.439
Jumlah		1.580.051.629	1.926.106.673
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1.172.640.533)	(1.458.598.691)
Nilai Buku per 31 Desember		407.411.096	467.507.982

Aset Tak Berwujud
Rp764.229.234

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp764.229.234,00 dan Rp669.729.234,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Ombudsman Republik Indonesia berupa *software* dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 32.
Nilai Aset Tak Berwujud 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Software Komputer	719.229.234	669.729.234
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	45.000.000.	-
Jumlah		764.229.234	669.729.234

Terdapat kenaikan nilai aset tak berwujud selama tahun 2018 sebesar Rp94.500.000,00. Mutasi nilai aset tak berwujud tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 33.
Rincian Aset Tak Berwujud

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
Saldo Awal Tahun		669.729.234	467.059.234
1	Pembelian Software	49.500.000	202.670.000
2.	Penambahan Aset Tak Berwujud Lainnya	45.000.000	-
Jumlah 31 Desember		764.229.234	669.729.234

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud berupa Software sebesar Rp49.500.000,00 dan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp45.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018.

*Aset Lain-Lain
Rp815.822.395*

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp815.822.395,00 dan Rp1.256.377.439,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Ombudsman Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari Barang Milik Negara.

TABEL 34.

Nilai Aset Lain-Lain 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	521.124.995	961.680.039
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	294.697.400	294.697.400
Jumlah		815.822.395	1.256.377.439

Terdapat penurunan nilai Aset lain-lain selama tahun 2018 sebesar Rp440.555.044,00. Adapun mutasi aset lain-lain dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 35.
Rincian Aset Lain-Lain

URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
SALDO AWAL TAHUN	1.256.377.439	1.256.377.439
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi dari aset tetap	52.744.150	-
Mutasi Kurang:		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-	-
Penghapusan BMN	493.299.194	-
Saldo Akhir per 31 Desember	815.822.395	1.256.377.439

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Lain-lain sebesar Rp52.744.150,00 dan terdapat pengurangan nilai sebesar Rp493.299.194,00 atas transaksi SIMAK BMN sampai

dengan 31 Desember 2018.

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(1.172.640.533,00)*

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(1.172.640.533,00).

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasi/pengamortisasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

TABEL 36.
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	464.788.609	338.520.580
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	509.078.084	921.304.271
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	198.773.840	198.773.840
Jumlah		1.172.640.533	1.458.598.691

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 37.
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Aset Tak Berwujud	764.229.234	464.788.609	299.440.625
2	Aset Lain-Lain	815.822.395	707.851.924	107.970.471
Jumlah		1.580.051.629	1.172.640.533	407.411.096

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp375.211.249*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp375.211.249,00 dan Rp329.574.269,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Ombudsman Republik Indonesia

per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 38.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	375.211.249	329.574.269
2	Uang Muka dari KPPN	-	-
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah		375.211.249	329.574.269

Utang Kepada

Pihak Ketiga

Rp375.211.249

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Ombudsman RI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp375.211.249,00 dan Rp329.574.269,00. Utang Kepada Pihak Ketiga adalah Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar, Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya. Terdapatnya Utang Kepada Pihak Ketiga Ombudsman Republik Indonesia adalah akibat belum terbayarkannya tagihan-tagihan yang sudah selesai pekerjaannya sampai dengan tanggal neraca, disajikan pada tabel berikut.

TABEL 39.
Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018	31 DES 2017
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	154.504.010	
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	220.707.239	190.766.029
3	Utang Pihak Ketiga Lainnya	-	138.808.240
Jumlah		375.211.249	329.574.269

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 40.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	31 DES 2018	31 DES 2017
SALDO AWAL TAHUN	329.574.269	1.374.333.858
Pengurangan:		
Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	(190.766.029)	(1.248.283.858)
Penghapusan Utang Honorarium Tahun 2015	(126.050.000)	-
Koreksi Utang	(12.758.240)	-
Sisa Utang Tahun Berjalan	-	126.050.000
Penambahan:		
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	154.504.010	-
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	220.707.239	190.766.029
Utang Pihak Ketiga Lainnya	-	12.758.240
Saldo per 31 Desember	375.211.249	329.574.269

Total Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp375.211.249,00 merupakan pengurangan dari pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp190.766.029,00, Penghapusan Utang Honorarium Tahun 2015 sebesar Rp126.050.000,00, dan Koreksi Utang sebesar Rp12.758.240,00. Penambahan Utang di Tahun 2018 sebesar Rp375.211.249,00 telah di reviu dan di verifikasi oleh Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia.

*Ekuitas
Rp27.016.828.550*

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.016.828.550,00 dan Rp27.852.569.979,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp(149.117.348.042)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2017 masing-masing minus Rp149.117.348.042,00 dan Rp137.087.105.914,00. Jumlah Tahun 2018 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp1.952.852,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp149.119.300.894,00.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp1.952.852

D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Operasional Ombudsman Republik Indonesia merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk 31 Desember Tahun 2018 dan 31 Desember Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.952.852,00 dan Rp23.574.250,00.

Beban Operasional Rp149.119.300.894

D.1.2 Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp149.119.300.894,00 dan Rp137.110.680.164,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada Tabel berikut ini:

TABEL 41.

Rincian Beban Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Beban Pegawai	60.219.273.830	48.161.588.930	25,04
Beban Persediaan	2.453.570.050	1.922.700.830	27,61
Beban Barang dan Jasa	35.795.536.505	36.627.603.908	(2,27)
Beban Pemeliharaan	5.557.003.631	5.158.534.240	7,72
Beban Perjalanan Dinas	39.741.146.847	40.026.787.582	(0,71)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.353.182.193	5.213.355.679	2,68
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(412.162)	108.995	(478,15)
TOTAL	149.119.300.894	137.110.680.164	8,76

Beban Pegawai
Rp60.219.273.830

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai untuk 31 Desember Tahun 2018 dan 31 Desember Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60.219.273.830,00 dan Rp48.161.588.930,00.

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 42.
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.686.753.690	7.094.542.937	8,35
Beban Honorarium	19.133.395.303	14.764.325.500	29,59
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	33.399.124.887	26.312.945.978	26,93
Jumlah Beban Kotor	60.219.273.880	48.171.814.415	25,01
Pengembalian Beban Pegawai	(50)	(10.225.485)	(100)
Jumlah Beban Bersih	60.219.273.830	48.161.588.930	25,04

Beban Persediaan
Rp2.453.570.050

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.453.570.050,00 dan Rp1.922.700.830,00. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 43.
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan
31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	2.453.510.050	1.922.700.830	27,60
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	60.000	0	0
Total	2.453.570.050	1.922.700.830	27,60

Beban Barang dan Jasa
Rp35.795.536.505

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang-Barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2018 dan 31 Desember Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp35.795.536.505,00 dan Rp36.627.603.908,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 44.
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	8.897.124.942	7.331.208.698	21,35
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.076.109.777	878.399.600	22,50
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	557.352.000	570.857.000	(2,36)
Beban Bahan	4.883.279.231	6.517.838.464	(25,07)
Beban Honor Output Kegiatan	1.371.998.123	1.249.325.000	9,81
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.476.697.142	3.616.418.463	(59,16)
Beban Langganan Listrik	1.977.250.275	2.008.206.750	(1,54)
Beban Langganan Telepon	340.135.650	309.168.463	(10,01)
Beban Langganan Air	177.351.190	183.107.157	(3,14)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.251.989.519	1.149.566.478	8,90
Beban Jasa Konsultan	0	8.763.251	(100)
Beban Sewa	8.977.741.614	8.585.577.269	4,56
Beban Jasa Profesi	971.729.780	965.700.000	0,62
Beban Jasa Lainnya	3.797.132.760	3.249.672.315	16,84
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	39.644.502	3.795.000	944,65
Jumlah Beban Barang dan Jasa	35.795.536.505	36.627.603.908	(2,27)

Beban Pemeliharaan
Rp5.557.003.631

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.557.003.631,00 dan Rp5.158.534.240,00.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 45.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.703.368.649	2.749.357.882	(1,67)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.850.982.122	2.409.116.358	18,34
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.442.860	60.000	3.971,43
Beban Persediaan suku cadang	210.000	0	0
Jumlah Beban Pemeliharaan	5.557.003.631	5.158.534.240	7,72

Beban Perjalanan Dinas
Rp39.741.146.847

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp39.741.146.847,00 dan Rp40.026.787.582,00. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 46.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2018	31 Desember TA 2017	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	23.568.689.987	21.414.960.400	10,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.669.846.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.261.614.812	13.355.882.767	(23,16)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.786.016.279	5.049.472.469	(25,02)
Beban Perjalanan Luar Negeri	454.979.769	206.471.946	120,35
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	39.741.146.847	40.026.787.582	(0,71)

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 5.353.182.193

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 5.353.182.193,00 dan Rp 5.213.355.679,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 47.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan
31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2018	31 Desember TA 2017	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.975.254.195	4.955.809.971	0,39
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	235.783.218	100.682.392	134,18
Beban Amortisasi Software	126.268.029	125.853.559	0,32
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	15.876.751	31.009.757	(48,80)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.353.182.193	5.213.355.679	2,68

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp(412.162)

D.1.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2018 berasal dari Pembayaran Piutang Bukan Pajak atas kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Ombudsman RI Tahun Anggaran 2018 untuk bulan November dan Desember. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk 31 Desember 2018 adalah sebesar minus (Rp 412.162,00).

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

TABEL 48.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2018	31 Desember TA 2017	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(412.162)	108.995	(350,25)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(412.162)	108.995	(478,148)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp384.855.714

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp384.855.714,00 dan Rp1.203.565.605,00. Jumlah Suplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 sebesar Rp384.855.714,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar minus (Rp6.341.724,00) dan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp391.197.438,00.

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Rp(6.341.724)

D.2.1 Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp(6.341.724,00) dan Rp0,00. Jumlah Suplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 sebesar Rp(6.341.724,00) tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp27.110.382,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp(33.452.106,00).

Rincian Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

TABEL 49.

Rincian Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Pemindahtempaan BMN Lainnya	27.110.382	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(33.452.106)	0
Jumlah	6.341.724	0

*Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp391.197.438*

D.2.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp391.197.438,00 dan Rp1.203.565.605,00. Jumlah Suplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp391.197.438,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp587.251.970,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(196.054.532,00).

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

TABEL 50.
Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	Kode Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Penerimaan:			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	423952	0	643.161.065
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	26.112.072	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	63.337.700	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	425913	12.609.678	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	491511	485.192.520	812.088.093
Beban:			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	593311	196.054.532	251.683.553
Jumlah		391.197.438,	1.203.565.605

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp27.852.569.979

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.852.569.979,00 dan Rp25.692.199.866,00.

Surplus/(Defisit) LO
Rp(248.732.492.328)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar minus Rp248.732.492.328,00 dan minus Rp135.883.540.309,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas
Rp439.564.882

E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp439.564.882,00 dan minus Rp5.653.125,00. Jumlah per 31 Desember 2018 dan 2017 tersebut terdiri atas :

TABEL 51.

Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	300.756.642	(5.653.125)
Koreksi Lain-Lain	138.808.240	0
TOTAL	439.564.882	(5.653.125)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp300.756.642

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp300.756.642,00 dan minus Rp5.653.125,00.

TABEL 52.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	300.756.642	20.000.000
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	(25.653.125)
TOTAL	300.756.642	(5.653.125)

Koreksi berasal dari Transaksi Mutasi Barang Milik Negara pada

aplikasi SIMAK-BMN berupa kapitalisasi biaya pemeliharaan *Air Conditioner (AC)* dan kesalahan pencatatan nilai Saldo Awal Peralatan Mesin yang tidak tercatat pada tahun sebelumnya.

Koreksi Lain- Lain
Rp138.808.240

E.3.2. Koreksi Lain-Lain

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp138.808.240,00 dan Rp. 0,00.

TABEL 53.

Rincian Koreksi Lain-Lain 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017
Koreksi Lain-Lain	138.808.240	0
TOTAL	138.808.240	0

Koreksi Lain-Lain berasal dari koreksi catatan tunggakan biaya pengelolaan air limbah kepada PD PAL JAYA atas tagihan bulan Mei dan September 2017 sesuai Surat PD PAL JAYA Nomor 395/-078.7 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp12.578.240,00 serta koreksi utang honorarium Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp126.050.000,00 yang tidak memenuhi klasifikasi utang jangka pendek.

Transaksi Antar Entitas
Rp147.457.186.017

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp147.457.186.017,00 dan Rp138.049.563.547,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 2017 tediри atas:

TABEL 54.

Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Des 2018	31 Des 2017
Ditagihkan Ke Entitas Lain	147.588.308.701	138.716.298.862
Diterima dari Entitas Lain	(131.122.684)	(666.735.315)
TOTAL	147.457.186.017	138.049.563.547

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp147.588.308.701

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp147.588.308.701,00 dan Rp138.716.298.862,00. Jumlah per 31 Desember 2018 merupakan realisasi belanja yang telah di terima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2018.

*Diterima dari Entitas
Lain Rp(131.122.684)*

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar minus Rp131.122.684,00 dan minus Rp666.735.315,00. Jumlah per 31 Desember 2018 merupakan penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu serta temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2018.

*Ekuitas Akhir
Rp27.016.828.550*

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.016.828.550,00 dan Rp27.852.569.979,00. Jumlah per 31 Desember 2018 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp27.392.039.799,00 di kurangi nilai Kewajiban sebesar Rp375.211.249,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Penting Lain-Lain sebagai berikut :

1. Sampai dengan per 31 Desember 2018 terdapat revisi RKA-KL sebanyak enam kali yaitu:
 - Revisi I tanggal 15 Mei 2018 (No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2018 Revisi ke 01).
 - Revisi II tanggal 13 September 2018 (No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2018 Revisi ke 02).
 - Revisi III tanggal 21 September 2018 (No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2018 Revisi ke 03).
 - Revisi IV tanggal 08 November 2018 (No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2018 Revisi ke 04).
 - Revisi V tanggal 03 Desember 2018 (No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2018 Revisi ke 05).
 - Revisi VI tanggal 31 Desember 2018 (No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2018 Revisi ke 06).
2. Sampai dengan per 31 Desember 2018 terdapat perubahan anggaran sebesar:
 - Penambahan Rp1.882.646.000,00 untuk alokasi Belanja Pegawai semula Rp58.099.734.000,00 menjadi Rp59.982.380.000,00
 - Pengurangan Rp1.032.524.000,00 untuk alokasi Belanja Barang semula Rp89.479.835.000,00 menjadi Rp88.444.311.000,00, dan
 - Penambahan Rp2.867.428.000,00 untuk alokasi Belanja Modal semula Rp545.437.00,00 menjadi Rp3.412.865.000,00.
3. Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas satu satker, yaitu Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (439624) dan menggunakan Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN.
4. Ombudsman Republik Indonesia mengelola satu rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Harmoni Sekretariat Negara dengan nomor rekening 96543728 (BPG182 OMBUDSMAN RI).

LAMPIRAN



AUDITED

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 08/04/2019 10:03 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	4,251,247,299	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	131,122,684	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	5,149,589,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	78,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	351,686,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	91,257,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	456,360,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	26,150,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	17,487,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	293,301,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	897,872,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	9,800,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	274,225,000
2.0	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap	0	19,133,407,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	33,281,168,000
2.0	512412	Allotment Belanja Pegawai Transito	0	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	9,151,896,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,195,200,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	594,360,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	5,263,634,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,442,256,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,496,910,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,131,840,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	1,981,288,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	355,656,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	185,712,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,287,156,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	9,010,008,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	1,347,016,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	3,871,967,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	3,870,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,051,785,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	25,063,587,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,954,572,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	10,596,402,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	4,125,066,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	468,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3,172,077,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	240,788,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindah tanginan BMN Lainnya	0	27,110,382
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	272,602
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26,112,072

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 08/04/2019 10:03 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	63,337,700
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,609,678
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,680,250
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,149,588,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	77,917	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	50
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	351,685,810	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	91,256,276	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	456,360,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	26,150,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	17,486,627	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	293,301,000	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	897,857,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	9,800,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	274,225,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	19,133,395,303	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	33,281,154,407	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,945,546,001	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,056,199,677	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	562,252,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	4,900,000
3.0	521211	Belanja Bahan	4,840,629,231	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,388,450,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	16,451,877
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,476,697,142	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,131,223,549	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,980,956,036	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	326,561,783	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	174,067,069	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,249,643,046	0
3.0	522141	Belanja Sewa	8,867,415,586	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	968,929,780	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,797,132,760	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,756,604,309	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,051,209,705	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	24,668,267,622	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,099,577,635
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,670,146,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,300,833,972	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	98,019,160
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,046,830,338	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 08/04/2019 10:03 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	260,814,059
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	467,956,075	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	12,976,306
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,146,170,667	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	225,288,000	0
JUMLAH			153,463,717,771	153,463,717,771

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 08/04/2019 10:07 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	3,113,505,376	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	37,014,633	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	185,073
0.0	117111	Barang Konsumsi	837,246,364	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	117114	Suku Cadang	0	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	7,315,400,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	41,357,097,591	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	4,174,183,910	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	50,935,475	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	29,564,103,963
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	336,465,610
0.0	162151	Software	719,229,234	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	45,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	521,124,995	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	294,697,400	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	509,078,084
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	464,788,609
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	198,773,840
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	154,504,010
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	220,707,239
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	147,588,308,701
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	131,122,684	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,852,569,979
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	300,756,642
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	138,808,240
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	27,110,382
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	272,602
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	26,112,072
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	63,337,700
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,609,678
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,680,250
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	485,192,520
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,176,824,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	77,917	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 08/04/2019 10:07 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	50
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	351,685,810	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	91,256,276	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	456,360,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	26,150,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	17,486,627	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	293,301,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	989,587,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	9,800,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	274,225,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	19,133,395,303	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	33,399,124,887	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	8,897,124,942	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,076,109,777	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	562,252,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	4,900,000
3.0	521211	Beban Bahan	4,883,279,231	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,388,450,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	16,451,877
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,476,697,142	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,977,250,275	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	340,135,650	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	177,351,190	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,251,989,519	0
3.0	522141	Beban Sewa	8,977,741,614	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	971,729,780	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,797,132,760	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,703,368,649	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,850,982,122	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	24,668,267,622	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	1,099,577,635
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,670,146,000	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,359,633,972	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	98,019,160
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,046,830,338	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	260,814,059
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	467,956,075	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	12,976,306
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,975,254,195	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	235,783,218	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	126,268,029	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 08/04/2019 10:07 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	15,876,751	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,453,510,050	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,442,860	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	210,000	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	60,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	196,054,532	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	412,162
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	39,644,502	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	33,452,106	0
JUMLAH			209,438,816,443	209,438,816,443

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 07/04/2019 10:47 PM
 lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASSET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3,113,505,376	3,120,991,906	(7,486,530)	(0.24)
Piutang Bukan Pajak	37,014,633	119,447,063	(82,432,430)	(69.01)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(185,073)	(597,235)	412,162	(69.01)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	36,829,560	118,849,828	(82,020,268)	(69.01)
Persediaan	837,246,364	878,410,028	(41,163,664)	(4.69)
JUMLAH ASSET LANCAR	3,987,581,300	4,118,251,762	(130,670,462)	(3.17)
ASSET TETAP				
Tanah	7,315,400,000	7,315,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	41,357,097,591	40,151,199,049	1,205,898,542	3.00
Aset Tetap Lainnya	4,225,119,385	3,069,208,880	1,155,910,505	37.66
AKUMULASI PENYUSUTAN	(29,900,569,573)	(26,939,423,425)	(2,961,146,148)	10.99
JUMLAH ASSET TETAP	22,997,047,403	23,596,384,504	(599,337,101)	(2.54)
ASSET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	764,229,234	669,729,234	94,500,000	14.11
Aset Lain-lain	815,822,395	1,256,377,439	(440,555,044)	(35.07)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASSET LAINNYA	(1,172,640,533)	(1,458,598,691)	285,958,158	(19.60)
JUMLAH ASSET LAINNYA	407,411,096	467,507,982	(60,096,886)	(12.85)
JUMLAH ASSET	27,392,039,799	28,182,144,248	(790,104,449)	(2.80)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	375,211,249	329,574,269	45,636,980	13.85
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	375,211,249	329,574,269	45,636,980	13.85
JUMLAH KEWAJIBAN	375,211,249	329,574,269	45,636,980	13.85
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	27,016,828,550	27,852,569,979	(835,741,429)	(3.00)
JUMLAH EKUITAS	27,016,828,550	27,852,569,979	(835,741,429)	(3.00)
JUMLAH EKUITAS	27,016,828,550	27,852,569,979	(835,741,429)	(3.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27,392,039,799	28,182,144,248	(790,104,449)	(2.80)

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 08/04/19 10:07
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 08/04/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNGAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0		0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0		0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0		0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0		0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0		0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0		0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0		0
Pendapatan Cukai	0	0		0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0		0
Pendapatan Bea Masuk	0	0		0
Pendapatan Bea Keluar	0	0		0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0		0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0		0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0		0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0		0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,952,852	23,574,250	(21,621,398)	(91.716)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,952,852	23,574,250	(21,621,398)	(91.716)
PENDAPATAN HIBAH	0	0		0
Pendapatan Hibah	0	0		0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0		0
Jumlah Pendapatan	1,952,852	23,574,250	(21,621,398)	(91.716)
BEBAN OPERASIONAL	0	0		0
Beban Pegawai	60,219,273,830	48,161,588,930	12,057,684,900	25.036
Beban Persediaan	2,453,570,050	1,922,700,830	530,869,220	27.611
Beban Barang dan Jasa	35,795,536,505	36,627,603,908	(832,067,403)	(2.272)
Beban Pemeliharaan	5,557,003,631	5,158,534,240	398,469,391	7.724
Beban Perjalanan Dinas	39,741,146,847	40,026,787,582	(285,640,735)	(0.714)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0		0
Beban Bunga	0	0		0
Beban Subsidi	0	0		0
Beban Hibah	0	0		0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 08/04/19 10:07
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 08/04/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNGAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,353,182,193	5,213,355,679	139,826,514	2.682
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(412,162)	108,995	(521,157)	(478.148)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	149,119,300,894	137,110,680,164	12,008,620,730	8.758
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(149,117,348,042)	(137,087,105,914)	(12,030,242,128)	8.776
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(6,341,724)	0	(6,341,724)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	27,110,382	0	27,110,382	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	33,452,106	0	33,452,106	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	391,197,438	1,203,565,605	(812,368,167)	(67.497)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	587,251,970	1,455,249,158	(867,997,188)	(59.646)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	196,054,532	251,683,553	(55,629,021)	(22.103)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	384,855,714	1,203,565,605	(818,709,891)	(68.024)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(148,732,492,328)	(135,883,540,309)	(12,848,952,019)	9.456
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(148,732,492,328)	(135,883,540,309)	(12,848,952,019)	9.456

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LPE.KL
 Tanggal : 08/04/19 10:03 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_kl --rekon17

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	27,852,569,979	25,692,199,866	2,160,370,113	8.409
SURPLUS/DEFISIT-LO	(148,732,492,328)	(135,883,540,309)	(12,848,952,019)	9.456
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	439,564,882	(5,653,125)	445,218,007	(7,875.6
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	300,756,642	(5,653,125)	306,409,767	(5,420.1
LAIN-LAIN	138,808,240	0	138,808,240	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	147,457,186,017	138,049,563,547	9,407,622,470	6.815
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(835,741,429)	2,160,370,113	(2,996,111,542)	(138.68
EKUITAS AKHIR	27,016,828,550	27,852,569,979	(835,741,429)	(3.001)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 07/04/19 11:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2018					2017				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0					0	
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	131,122,684	(131,122,684)	0	0	666,735,315	(666,735,315)	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	131,122,684	(131,122,684)	0	0	666,735,315	(666,735,315)	0	0	
B	BELANJA				0					0	
	BELANJA PEGAWAI	59,982,380,000	59,982,337,390	42,610	100	52,655,448,000	48,183,387,998	4,472,060,002	92		
	BELANJA BARANG	88,444,311,000	84,234,512,644	4,209,798,356	95	96,376,945,000	84,645,740,449	11,731,204,551	88		
	BELANJA MODAL	3,412,865,000	3,371,458,667	41,406,333	99	6,096,271,000	5,887,170,415	209,100,585	97		
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	151,839,556,000	147,588,308,701	4,251,247,299	97	155,128,664,000	138,716,298,862	16,412,365,138	89		
C	PEMBIAYAAN				0					0	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.KL.1
 Tanggal : 07/04/19 11:06
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,980,268,000	5,149,589,000	5,149,588,100	0	5,149,588,100	100	900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	102,000	78,000	77,917	50	77,867	99.89	133
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	282,632,000	351,686,000	351,685,810	0	351,685,810	100	190
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	67,228,000	91,257,000	91,256,276	0	91,256,276	100	724
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	417,300,000	456,360,000	456,360,000	0	456,360,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	325,000,000	26,150,000	26,150,000	0	26,150,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	14,000,000	17,487,000	17,486,627	0	17,486,627	100	373
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	243,600,000	293,301,000	293,301,000	0	293,301,000	100	0
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,233,787,000	897,872,000	897,857,000	0	897,857,000	100	15,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	9,600,000	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	248,490,000	274,225,000	274,225,000	0	274,225,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7,822,007,000	7,567,805,000	7,567,787,730	50	7,567,787,680	100	17,320
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	18,767,798,000	19,133,407,000	19,133,395,303	0	19,133,395,303	100	11,697
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	18,767,798,000	19,133,407,000	19,133,395,303	0	19,133,395,303	100	11,697
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	31,019,529,000	33,281,168,000	33,281,154,407	0	33,281,154,407	100	13,593
512412	Belanja Pegawai Transito	490,400,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	31,509,929,000	33,281,168,000	33,281,154,407	0	33,281,154,407	100	13,593
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	58,099,734,000	59,982,380,000	59,982,337,440	50	59,982,337,390	100	42,610
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,378,692,000	9,151,896,000	8,945,546,001	0	8,945,546,001	97.75	206,349,999
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,290,000,000	1,195,200,000	1,056,199,677	0	1,056,199,677	88.37	139,000,323
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	645,840,000	594,360,000	562,252,000	4,900,000	557,352,000	94.6	37,008,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	10,314,532,000	10,941,456,000	10,563,997,678	4,900,000	10,559,097,678	96.55	382,358,322
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,346,458,000	5,263,634,000	4,840,629,231	0	4,840,629,231	91.96	423,004,769
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,309,030,000	1,442,256,000	1,388,450,000	16,451,877	1,371,998,123	96.27	70,257,877
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,572,500,000	1,496,910,000	1,476,697,142	0	1,476,697,142	98.65	20,212,858
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,227,988,000	8,202,800,000	7,705,776,373	16,451,877	7,689,324,496	93.94	513,475,504
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.KL.1
 Tanggal : 07/04/19 11:06
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,427,100,000	2,131,840,000	2,131,223,549	0	2,131,223,549	99.97	616,451
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,427,100,000	2,131,840,000	2,131,223,549	0	2,131,223,549	99.97	616,451
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,755,400,000	1,981,288,000	1,980,956,036	0	1,980,956,036	99.98	331,964
522112	Belanja Langganan Telepon	775,200,000	355,656,000	326,561,783	0	326,561,783	91.82	29,094,217
522113	Belanja Langganan Air	276,000,000	185,712,000	174,067,069	0	174,067,069	93.73	11,644,931
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,476,000,000	1,287,156,000	1,249,643,046	0	1,249,643,046	97.09	37,512,954
522141	Belanja Sewa	12,399,900,000	9,010,008,000	8,867,415,586	0	8,867,415,586	98.42	142,592,414
522151	Belanja Jasa Profesi	1,827,000,000	1,347,016,000	968,929,780	0	968,929,780	71.93	378,086,220
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,417,000,000	3,871,967,000	3,797,132,760	0	3,797,132,760	98.07	74,834,240
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	23,926,500,000	18,038,803,000	17,364,706,060	0	17,364,706,060	96.26	674,096,940
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,627,700,000	3,870,000,000	3,756,604,309	0	3,756,604,309	97.07	113,395,691
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,222,920,000	3,051,785,000	3,051,209,705	0	3,051,209,705	99.98	575,295
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,850,620,000	6,921,785,000	6,807,814,014	0	6,807,814,014	98.35	113,970,986
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	23,739,162,000	25,063,587,000	24,668,267,622	1,099,577,635	23,568,689,987	98.42	1,494,897,013
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,520,700,000	1,954,572,000	1,670,146,000	300,000	1,669,846,000	85.45	284,726,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,386,765,000	10,596,402,000	10,300,833,972	98,019,160	10,202,814,812	97.21	393,587,188
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,711,069,000	4,125,066,000	4,046,830,338	260,814,059	3,786,016,279	98.1	339,049,721
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	39,357,696,000	41,739,627,000	40,686,077,932	1,458,710,854	39,227,367,078	97.48	2,512,259,922
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	468,000,000	468,000,000	467,956,075	12,976,306	454,979,769	99.99	13,020,231
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	468,000,000	468,000,000	467,956,075	12,976,306	454,979,769	99.99	13,020,231
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	89,572,436,000	88,444,311,000	85,727,551,681	1,493,039,037	84,234,512,644	96.93	4,209,798,356
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323,836,000	3,172,077,000	3,146,170,667	0	3,146,170,667	99.18	25,906,333
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	323,836,000	3,172,077,000	3,146,170,667	0	3,146,170,667	99.18	25,906,333
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	129,000,000	240,788,000	225,288,000	0	225,288,000	93.56	15,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	129,000,000	240,788,000	225,288,000	0	225,288,000	93.56	15,500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	452,836,000	3,412,865,000	3,371,458,667	0	3,371,458,667	98.79	41,406,333

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
 TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.KL.1
 Tanggal : 07/04/19 11:06
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	148,125,006,000	151,839,556,000	149,081,347,788	1,493,039,087	147,588,308,701	98.18	4,251,247,299

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 07/04/19 11:06
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	27,110,382	0	27,110,382	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	27,110,382	0	27,110,382	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	272,602	0	272,602	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	272,602	0	272,602	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26,112,072	0	26,112,072	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	63,337,700	0	63,337,700	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,609,678	0	12,609,678	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,680,250	0	1,680,250	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	103,739,700	0	103,739,700	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	131,122,684	0	131,122,684	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	131,122,684	0	131,122,684	

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSI SI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018
TAHUN ANGGARAN 2018**

UAPB : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UAKPB : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal : 16/04/19 12:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_sat

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	837,246,364
131111	Tanah	25,847,516,000
132111	Peralatan dan Mesin	41,357,097,591
135111	Aset Tetap Renovasi	4,174,183,910
135121	Aset Tetap Lainnya	50,935,475
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(29,564,103,963)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(336,465,610)
162151	Software	719,229,234
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	45,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	521,124,995
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	294,697,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(509,078,084)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(464,788,609)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(198,773,840)
J U M L A H		42,773,820,863

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

UAPB : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UAKPB : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal : 16/04/19 11:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	14,972,218
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	20,413,500
1010301003	Penjepit Kertas	2,610,250
1010301004	Penghapus/Korektor	842,000
1010301005	Buku Tulis	4,306,000
1010301006	Ordner Dan Map	82,350,320
1010301007	Penggaris	903,900
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1,439,400
1010301010	Alat Perekat	2,578,000
1010301011	Stadler HD	2,730,475
1010301012	Staples	315,000
1010301013	Isi Staples	1,546,000
1010301014	Barang Cetakan	12,299,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	39,574,500
1010302001	Kertas HVS	24,765,200
1010302002	Berbagai Kertas	1,749,825
1010302003	Kertas Cover	226,800
1010302004	Amplop	6,806,600
1010302005	Kop Surat	4,455,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	36,100
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	199,858,800
1010304004	Tinta/Toner Printer	285,617,832
1010304006	USB/Flash Disk	5,049,600
1010304011	CD/DVD	1,232,500
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	16,820,694
1010306010	Batu Baterai	18,662,250
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	85,084,600
Jumlah Barang Konsumsi		837,246,364
TOTAL		837,246,364

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-694/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode April 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	148,125,006,000	148,125,006,000	0
2	Belanja	32,141,305,683	32,141,305,683	0
3	Pengembalian Belanja	-334,215,476	-334,215,476	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	12,582,076	12,582,076	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan April tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 148,125,006,000
SAI/SA-BUN : 148,125,006,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 32,141,305,683
SAI/SA-BUN : 32,141,305,683

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -334,215,476
SAI/SA-BUN : -334,215,476

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 12,582,076
SAI/SA-BUN : 12,582,076

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-25184/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Mei 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	148,125,006,000	148,125,006,000	0
2	Belanja	46,310,407,943	46,310,407,943	0
3	Pengembalian Belanja	-492,415,751	-492,415,751	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	45,258,796	45,258,796	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP,
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 148,125,006,000
SAI/SA-BUN : 148,125,006,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 46,310,407,943
SAI/SA-BUN : 46,310,407,943

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -492,415,751
SAI/SA-BUN : -492,415,751

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 45,258,796
SAI/SA-BUN : 45,258,796

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP,
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-51847/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juni 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	148,125,006,000	148,125,006,000	0
2	Belanja	59,343,476,105	59,343,476,105	0
3	Pengembalian Belanja	-613,765,832	-613,765,832	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	61,278,796	61,278,796	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP,
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Juni tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 148,125,006,000
SAI/SA-BUN : 148,125,006,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 59,343,476,105
SAI/SA-BUN : 59,343,476,105

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -613,765,832
SAI/SA-BUN : -613,765,832

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 61,278,796
SAI/SA-BUN : 61,278,796

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP,
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-79396/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juli 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	148,125,006,000	148,125,006,000	0
2	Belanja	73,405,176,097	73,405,176,097	0
3	Pengembalian Belanja	-820,206,306	-820,206,306	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	64,796,726	64,796,726	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP,
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Juli tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 148,125,006,000
SAI/SA-BUN : 148,125,006,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 73,405,176,097
SAI/SA-BUN : 73,405,176,097

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -820,206,306
SAI/SA-BUN : -820,206,306

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 64,796,726
SAI/SA-BUN : 64,796,726

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU, AP,
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-87072/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Agustus 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	148,125,006,000	148,125,006,000	0
2	Belanja	84,610,619,002	84,610,619,002	0
3	Pengembalian Belanja	-887,128,677	-887,128,677	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	76,267,476	76,267,476	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 148,125,006,000
SAI/SA-BUN : 148,125,006,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 84,610,619,002
SAI/SA-BUN : 84,610,619,002

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -887,128,677
SAI/SA-BUN : -887,128,677

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 76,267,476
SAI/SA-BUN : 76,267,476

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-108067/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode September 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	296,250,012,000	296,250,012,000	0
2	Belanja	198,158,994,586	198,158,994,586	0
3	Pengembalian Belanja	-2,020,113,424	-2,020,113,424	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	207,003,012	207,003,012	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	4,000,000,000	4,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	4,000,000,000	4,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan September tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 296,250,012,000

SAI/SA-BUN : 296,250,012,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 198,158,994,586

SAI/SA-BUN : 198,158,994,586

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -2,020,113,424

SAI/SA-BUN : -2,020,113,424

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 207,003,012

SAI/SA-BUN : 207,003,012

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 4,000,000,000

SAI/SA-BUN : 4,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 4,000,000,000

SAI/SA-BUN : 4,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-140456/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Oktober 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	148,125,006,000	148,125,006,000	0
2	Belanja	114,176,592,796	114,176,592,796	0
3	Pengembalian Belanja	-1,203,367,298	-1,203,367,298	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	116,111,184	116,111,184	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Oktober tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 148,125,006,000
SAI/SA-BUN : 148,125,006,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 114,176,592,796
SAI/SA-BUN : 114,176,592,796

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,203,367,298
SAI/SA-BUN : -1,203,367,298

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 116,111,184
SAI/SA-BUN : 116,111,184

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan/kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-154152/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Nopember 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	151,839,556,000	151,839,556,000	0
2	Belanja	126,185,407,258	126,185,407,258	0
3	Pengembalian Belanja	-1,328,534,297	-1,328,534,297	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	116,111,184	116,111,184	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 151,839,556,000

SAI/SA-BUN : 151,839,556,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 126,185,407,258

SAI/SA-BUN : 126,185,407,258

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,328,534,297

SAI/SA-BUN : -1,328,534,297

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 116,111,184

SAI/SA-BUN : 116,111,184

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-178495/WPB.11/KP.182/2018

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	151,839,556,000	151,839,556,000	0
2	Belanja	149,081,347,788	149,081,347,788	0
3	Pengembalian Belanja	-1,493,039,087	-1,493,039,087	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	131,122,684	131,122,684	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi
UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 151,839,556,000
SAI/SA-BUN : 151,839,556,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 149,081,347,788
SAI/SA-BUN : 149,081,347,788

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,493,039,087
SAI/SA-BUN : -1,493,039,087

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 131,122,684
SAI/SA-BUN : 131,122,684

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan/kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



**JL. HR RASUNA SAID KAV. C-19 KUNINGAN
JAKARTA SELATAN 12920**

**TELP. (021) 5296 0894-95, 5296 0904-05 FAX : (021) 5296 0907-08
WWW.OMBUDSMAN.GO.ID**